



## **Diplomasi Pertahanan Indonesia dalam Membangun Identitas Berbeda di antara Negara- Negara di Kawasan Asia Tenggara**

*Indonesian Defense Diplomacy in Building a Different Identity  
among Countries in the Southeast Asia Region*

**Adhit Prayoga**

ASEAN-Indonesia Youth Ambassador at Ministry of  
Foreign Affairs of the Republic of Indonesia  
(adhit.prayoga@outlook.com)

### **Abstrak**

*The country acts based on its political identity, where several elements like interactions, norms, culture, status, and state history are able to form this identity. Every country has a different way to understand its element, which generates different identities, policies, and strategies between countries in the international system. The purpose of this study is to explain the accumulation of identity-forming elements that form the identity of free and active foreign policy in Indonesia. This research was prepared using the perspective of Constructivism, the theory of Free and Active Politics as well as Defense Diplomacy. This research used descriptive qualitative research methods in which the research data was obtained through a literature review. The results of this research indicate that Indonesia, through an understanding of the elements forming identity, has formed a free and active foreign policy identity. Indonesia uses free and active identity to achieve national interests and maintain its existence in the international system. With a different political identity from Indonesia, other countries in Southeast Asia tend to cooperate with either the United States of America or China. Through the implementation of free and active foreign policy, Indonesia is the only neutral country in Southeast Asia which means that Indonesia is in the middle of both superpowers.*

**Keywords:** *Political Identity; Free and Active; National Interest; Tendency; and Neutrality*



## 1. Pendahuluan

Berakhirnya perang dingin membuat dunia memasuki proses globalisasi yang menghapus batas-batas pergerakan dalam segala dimensi kehidupan antar negara. Globalisasi telah mengubah pola interaksi antar negara di dalam sistem internasional, dari yang awalnya saling curiga, menjadi saling bergantung dalam bidang politik, keamanan, ekonomi, maupun sosial-budaya. Hal ini merupakan konsekuensi logis dari tidak dapat diprediksinya perubahan-perubahan yang terjadi di dalam sistem internasional. Proses globalisasi yang terus meluas dan sistem internasional yang fleksibel, telah menimbulkan komplikasi terhadap konsep dasar ancaman dalam interaksi antar negara (Cha, 2000, pp. 393-394). Hal ini memaksa setiap negara mempersiapkan kebijakan-kebijakan tertentu, untuk mempertahankan eksistensinya di dalam sistem internasional dan mewujudkan kepentingan nasionalnya.

Negara sebagai *rational actor* akan membuat sebuah kebijakan berdasarkan analisis yang mempertimbangkan *cost-benefit*, dimana kepentingan nasional merupakan tujuan akhir dari sebuah keputusan (Keohane, 1986, p. 164). Negara-negara *middle power* dan *minor power* akan menunjukkan kecenderungan untuk mendukung stabilitas dan keterpaduan setiap negara di dunia. Kebijakan luar negerinya terbentuk atas dasar identitas politik luar negeri dan pertimbangan tertentu seperti identifikasi kapabilitas negara, perubahan dalam sistem internasional, dan peran serta pengaruh dari aktor pembuat kebijakan. Kebijakan-kebijakan yang dibentuk oleh negara *middle power* dan *minor power* merupakan manifestasi dari upaya untuk merealisasikan kepentingan nasionalnya dan mewujudkan kesetaraan kekuatan antar negara di dalam sistem internasional (Jordaan, 2003, pp. 161-178).



Status sebagai negara yang pernah dijajah dan masuk ke dalam kategori *middle power* telah mempengaruhi cara pandang pembuat kebijakan Indonesia untuk berorientasi pada asas kebebasan, tanpa adanya paksaan dari negara lain. Cara pandang tersebut direalisasikan dalam bentuk identitas politik bebas aktif, yang menjadikan Indonesia sebagai satu-satunya negara netral di kawasan Asia Tenggara. Netralitas ini mempengaruhi strategi Indonesia dalam mewujudkan kepentingan nasional dan mempertahankan eksistensinya di dalam sistem internasional.

## **2. Tinjauan Pustaka**

### **2.1 Perspektif Konstruktivisme**

Konstruktivisme merupakan perspektif yang menekankan pada kesadaran manusia dalam membentuk sebuah ide, artinya tidak ada suatu hal di dalam masyarakat yang natural, tetapi semuanya terkonstruksi melalui kesadaran manusia. Kaum konstruktivisme menjelaskan bahwa sistem internasional terbentuk berdasarkan kerangka pemikiran dan norma setiap negara dalam melakukan interaksi ataupun menunjukkan perilaku tertentu (Jackson & Sorensen, 2013, p. 365). Sistem internasional yang anarki adalah apa yang dibentuk oleh negara-negara di dalam sistem tersebut, dengan interpretasi terhadap pemahaman mengenai lingkungan (Wendt, 1992, pp. 391-393).

Konstruktivisme memandang bahwa meskipun sistem terlihat membatasi para aktor untuk melakukan tindakan, negara tetap dapat mentransformasi sistem dengan pemahaman mengenai sistem tersebut dan bertidak berdasarkan strategi-strategi yang diinterpretasi dari pemahaman tentang sistem internasional. Hubungan antara sistem dan aktor negara melibatkan pemahaman dan makna intersubjektif, sehingga hubungan yang diwujudkan bersifat dinamis (Jones & Karsten, 2008, pp. 128-129). Sistem



internasional merupakan ranah intersubjektif yang membentuk interaksi antar negara yang didasarkan pada pemikiran dan ide, bukan pada kondisi material atau kekuatan (Jackson & Sorensen, 2013, p. 370).

Interaksi, norma, kebudayaan, status dan sejarah negara berperan penting untuk menciptakan interpretasi yang berbeda mengenai sistem internasional di masing-masing negara. Elemen tersebut kemudian membentuk sebuah konsep identitas yang didefinisikan sebagai doktrin yang akan menjadi panduan negara tersebut melakukan tindakan (Busse, 1999, p. 45). Identitas menjadi hal fundamental dalam proses menentukan kepentingan, kebijakan dan strategi negara karena hal ini akan menjelaskan mengenai *“who we are, what is our goal, and what role should we play”* dalam sistem internasional (Nia, 2010, pp. 151-152).

Keinginan untuk tidak menjadi objek dalam perjuangan politik internasional, melainkan menjadi subjek yang memiliki hak untuk menentukan pilihannya sendiri menjadi norma yang membentuk identitas politik luar negeri Indonesia yang dikenal sebagai bebas aktif. Sejarah bahwa Indonesia merupakan salah satu negara yang pernah dijajah di dunia, memperkuat keinginan tersebut. Indonesia menolak penjajahan dalam bentuk apapun terhadap dirinya ataupun terhadap negara lain, dan menolak hal-hal yang tidak sesuai dengan ideologi serta konstitusi negara (Haryanto, 2014, p. 23).

## 2.2 Teori Politik Bebas Aktif

Indonesia adalah salah satu negara yang masih menggunakan doktrin lama politik luar negeri sebagai pedoman dalam melaksanakan kegiatan luar negeri saat ini, doktrin tersebut dinamakan politik bebas aktif. Bebas diartikan sebagai kebebasan dalam menentukan sikap atas masalah-masalah internasional dan terlepas dari kutub-kutub kekuatan dunia, serta aktif diaplikasikan untuk berkontribusi dalam menyelesaikan



berbagai masalah internasional. Dalam konteks pelaksanaannya, politik bebas aktif merupakan istilah yang dimaknai secara berbeda oleh setiap rezim pemerintahan (Yani & Montratama, 2017, pp. 59-61).

Politik luar negeri bebas aktif merupakan sebuah alat bagi Indonesia untuk merealisasikan kepentingan nasionalnya, terutama dalam aspek ekonomi yang akan berdampak pada kesejahteraan masyarakat, aspek militer sebagai upaya untuk menguatkan kapabilitas pertahanan negara dan aspek kedaulatan untuk menjaga keutuhan teritorial Indonesia dari ancaman-ancaman domestik ataupun internasional. Meskipun istilah terhadap politik bebas aktif akan berbeda di dalam setiap rezim pemerintahan, tujuannya akan relatif stabil mengingat landasan politik luar negeri meliputi ideologi dan konstitusi. Landasan ideologi Indonesia adalah Pancasila yang pelaksanaannya mendukung kehidupan berbangsa dan bernegara. Landasan konstitusional akan menjamin tujuan politik luar negeri berupa penghapusan penjajahan untuk melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial (Indrawati & Nugroho, 2018, p. 74).

Politik bebas aktif pertama kali dikemukakan oleh Sutan Sjahrir saat mengikuti *Inter Asia Relations Conference* pada tahun 1947 di New Delhi. Sutan Sjahrir menyatakan bahwa setiap negara harus memperhatikan kekuatan-kekuatan yang saling bermusuhan, untuk tidak memihak pada blok manapun dalam merealisasikan kepentingan nasionalnya (Sabiring, M., & Arif, 2014, pp. 11-12). Pernyataan Sutan Sjahrir diperkuat dengan pidato Moh. Hatta yang berjudul *Mendayung di Antara Dua Karang* pada 2 September 1948, dimana sikap untuk terbebas dari sistem yang bertentangan dapat dilaksanakan dengan perjuangan atas kesanggupan diri sendiri (Hatta, 2015, p. 21). Hal ini kemudian dimaknai sebagai sikap politik yang bebas aktif dimana bebas berarti tidak terlibat dalam blok barat



ataupun timur dan aktif dalam upaya untuk menjaga perdamaian dan meredakan ketegangan antar blok (Djumati, Lengkong, & Tulung, 2002, p. 2)

Implementasi politik bebas aktif akan berdampak pada pemenuhan kepentingan nasional tanpa harus terlibat di dalam sebuah aliansi dengan kecenderungan terhadap negara tertentu (Montratama, 2015, p. 129). Dalam struktur sistem internasional, prinsip *self-help* diterapkan oleh Indonesia dengan identitas politik bebas aktif untuk merealisasikan keamanan dan kepentingan nasional dengan mempertimbangkan situasi internal maupun eksternal. Kemampuan untuk meningkatkan kekuatan pertahanan militer untuk menciptakan daya tangkal dalam menghadapi ancaman dominasi negara lain, kekuatan diplomasi untuk menciptakan kerja sama dan meminimalisir potensi konflik dengan negosiasi, menjadi upaya Indonesia untuk menjaga kepentingan nasionalnya dalam sistem internasional.

### **2.3 Teori Diplomasi Pertahanan**

Diplomasi pertahanan merupakan turunan dari pelaksanaan diplomasi yang merupakan cabang dari politik luar negeri. Diplomasi pertahanan dilakukan oleh dua atau lebih negara, untuk membahas mengenai hal-hal yang berkaitan dengan spektrum pertahanan. Diplomasi pertahanan akan memperhatikan pengembangan hubungan yang saling menguntungkan antara aktor yang terlibat untuk mewujudkan kesetaraan kekuatan di dalam sistem internasional. Cakupan dari diplomasi pertahanan antara lain untuk memperkuat kerja sama dan rasa saling percaya antar negara, meningkatkan kapabilitas pertahanan, mencegah pengembangan senjata pemusnah masalah, melaksanakan operasi kemanusiaan, dan meningkatkan kapabilitas militer melalui pengerahan pasukan perdamaian (Pedrason, 2020).



Dalam upaya memperkuat pertahanan negara, Indonesia melakukan *Internal dan External balancing*. *Internal balancing* dilakukan Indonesia melalui peningkatan kemampuan ekonomi dan kapabilitas militernya untuk mencegah ketidaksetaraan dengan negara lain, hal ini menjadi sebuah strategi *deterrence* terhadap kekuatan yang lebih besar (Kaufman, Little, & Wohlforth, 2007, pp. 9-10). Indonesia mewujudkan *external balancing* dengan pelaksanaan diplomasi pertahanan dan menghasilkan kerangka kerja sama pertahanan yang bertujuan untuk menyeimbangkan kekuatan negara yang lebih besar, dan memperkuat kapabilitas pertahanan Indonesia (Wilkins, 2011, p. 54).

Indonesia melakukan diplomasi pertahanan untuk membentuk kerja sama dengan negara-negara tertentu di dalam sistem internasional. Kerja sama pertahanan memiliki beberapa bentuk seperti aliansi, koalisi, kemitraan strategis, dan komunitas keamanan (Wilkins, 2011, p. 54). Indonesia dengan identitas politik bebas aktif merealisasikan diplomasi pertahanan untuk memperkuat kerja sama dalam bentuk kemitraan strategis sebagai sebuah manifestasi dari upaya negara untuk mencapai kepentingan nasional khususnya untuk meningkatkan kapabilitas pertahanan melalui pemenuhan kebutuhan militer domestik (Drab, 2018, p. 69).

#### **2.4 Metode Penelitian**

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dimana penelitian ini tidak menggunakan proses perhitungan dan kekuatan angka, melainkan deskripsi data. Penelitian ini memaparkan permasalahan secara komprehensif dengan menggunakan fakta – fakta yang telah diperoleh dan melihat hakikat antar variabel yang ada serta menelaah lebih dalam mengenai hubungan sebab – akibat antar variabel. Dalam teknik pengumpulan data, penulis menggunakan teknik studi kepustakaan (*library research*)



yang berasal dari sumber buku, ataupun media lainnya seperti laporan resmi dan non resmi, jurnal, ataupun berita yang berbasis cetak maupun *online*.

### **3 Hasil dan Diskusi**

#### **3.1 Relevansi Politik Bebas Aktif dalam Kebijakan Luar Negeri Indonesia**

Manifestasi politik luar negeri Indonesia dalam bidang pertahanan, diwujudkan melalui pelaksanaan diplomasi pertahanan untuk menghasilkan kerja sama di bidang pertahanan. Indonesia merupakan negara yang tidak memiliki aliansi dengan negara atau kelompok manapun, tetapi terlibat dalam kemitraan strategis yang menyangkut masalah keamanan dengan Australia, Amerika Serikat, Jepang, Jerman, Korea Selatan, Rusia dan Tiongkok (Montratama, 2016, p. 47). Indonesia di dalam kerangka *Association of Southeast Asian Nations* (ASEAN) juga telah terlibat di dalam komunitas keamanan, yaitu *ASEAN Political-Security Community* (APSC) (Perutusan Tetap Republik Indonesia untuk ASEAN di Jakarta, 2015).

Kemitraan strategis adalah sebuah bentuk kerja sama yang dilakukan secara bilateral ataupun multilateral terhadap bidang tertentu, termasuk pertahanan. Kemitraan strategis menjadi instrumen diplomasi dalam sistem internasional yang tidak mengikat dan dibangun atas dasar kepentingan bersama (Montratama & Yani, 2017, p. 56) karena sifatnya yang *trade off* atau transaksional. Terdapat suatu hal yang berharga bagi kedua belah pihak yang kemudian ditukarkan satu sama lain.

Secara luas, Indonesia dapat dikatakan tidak lagi bersifat non blok karena telah memiliki kerja sama pertahanan berbentuk kemitraan strategis dan komunitas keamanan, tetapi jika non blok diartikan sebagai bebas dari aliansi, status Indonesia masih menjadi sebagai negara non blok. Hal ini juga diperkuat dengan tidak adanya





kecenderungan Indonesia terhadap satu negara mitra strategis, bahwa setiap negara mendapatkan perlakuan yang sama dalam kemitraan strategis dengan Indonesia.

### 3.2 Pelaksanaan Politik Bebas Aktif Indonesia dalam Kemitraan Strategis

Indonesia melalui politik bebas aktif telah membentuk kebijakan dan strategi dengan fokus melaksanakan *internal balancing* dalam bidang pengembangan industri dan alutsista. Tetapi dalam aspek pengadaan, Indonesia cenderung untuk melakukan *external balancing* dengan produsen alutsista yang tidak berasal dari satu negara saja (Yani & Montratama, 2017, pp. 12-13). Hal ini dikarenakan embargo yang pernah dilakukan oleh Amerika Serikat atas kasus penegakan integrasi di Timor Timur dan Papua yang dilaksanakan oleh Tentara Nasional Indonesia (TNI). Kasus tersebut dinilai oleh Amerika Serikat telah melanggar hak asasi manusia, sehingga embargo dilaksanakan untuk menghentikan tindakan tersebut dengan pemberhentian pasokan alat yang digunakan oleh TNI (Tempo.co, 2014). Embargo telah mempengaruhi persepsi aktor pembuat kebijakan untuk membangun jalan kemandirian industri pertahanan dan tidak bergantung pada satu negara dalam meningkatkan kapabilitas pertahanan Indonesia.

Melalui pelaksanaan diplomasi pertahanan, Indonesia telah membentuk kerja sama pertahanan dalam bentuk kemitraan strategis dengan Australia (2005), Amerika Serikat (2010), Jepang (2006), Jerman (2012), Korea Selatan (2006), Rusia (2003), dan Tiongkok (2005) (Bappenas, 2015). Kemitraan strategis tersebut digunakan Indonesia sebagai bentuk *capacity building* dan memenuhi kebutuhan militer dalam negeri.

#### A. Kemitraan Strategis Indonesia – Australia

Penguatan hubungan diplomatik antara Indonesia dan Australia dilakukan dengan penandatanganan landasan kemitraan strategis, yaitu *Joint Declaration on Comprehensive*



*Partnership Between Australia and the Republic of Indonesia* pada tahun 2005. Landasan tersebut kemudian dilanjutkan dengan kerja sama pertahanan kedua belah negara, yaitu *Agreement Between the Republic of Indonesia and Australia on the Framework for Security Cooperation* pada tahun 2006 yang berlaku sejak tahun 2008 (Koran Tempo, 2008).

Ruang lingkup dari kemitraan strategis di bidang pertahanan antara Indonesia dan Australia antara lain konsultasi berkala mengenai masalah-masalah pertahanan dan keamanan; pengembangan dan pembangunan kapasitas angkatan bersenjata, melalui pendidikan dan pelatihan militer, kunjungan dan pertukaran pendidikan perwira; serta memfasilitasi kerja sama di bidang teknologi pertahanan, seperti desain bersama, pengembangan, produksi, pemasaran, dan *transfer of technology* (Treaty Kemlu RI, 2006).

Konsultasi berkala mengenai masalah-masalah pertahanan dan keamanan menjadi dasar pembentukan *Annual Leaders' Meeting (ALM)*, *Foreign and Defence Ministers' Meeting (2+2 Dialogue)*, dan *Indonesia-Australia Dialogue (IAD)* (Kemlu RI, 2014). Bentuk kerja sama terakhir yang dilakukan oleh kedua belah negara adalah pelaksanaan pertukaran pendidikan melalui *Defence and Strategic Course (DSCC)* dari *War College* Australia di Kementerian Pertahanan Republik Indonesia pada tahun 2019 (Abke, 2019).

## B. Kemitraan Strategis Indonesia – Amerika Serikat

Penandatanganan *Joint Declaration on the Comprehensive Partnership* pada November 2010 menjadi awal penguatan hubungan diplomatik Indonesia dan Amerika Serikat. Landasan tersebut dilanjutkan dengan *Joint Statement on Comprehensive Defense Cooperation* pada tahun 2015 (Lyng, 2012). Kerja sama pertahanan Indonesia dan Amerika Serikat meliputi dialog dan konsultasi bilateral tentang isu-isu keamanan yang menjadi perhatian bersama melalui *the Indonesian-United States Security Dialogue* dan *United States-*



Indonesia *Bilateral Defense Discussion*; peningkatan kualitas sumber daya manusia pada angkatan bersenjata melalui pendidikan dan pelatihan; pengembangan kemampuan kedua negara dalam bidang keamanan maritim; dan kerja sama penyediaan kebutuhan militer (Treaty Kemlu RI, 2015).

Realisasi terbaru dari ruang lingkup kerja sama pertahanan antara Indonesia dan Amerika Serikat antara lain program pertukaran militer antara Korps Marinir Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut (TNI AL) dan Korps Marinir Amerika Serikat (U.S. *Corps Marine*) di Amerika Serikat pada tahun 2019 (U.S. Embassy Jakarta, 2019), wacana pembelian alutsista Amerika Serikat oleh Indonesia berupa pesawat tempur dan peralatan yang dapat menunjang pesawat tempur Indonesia senilai USD 2 Miliar (DSCA, 2020), dan pertemuan Menteri Pertahanan Republik Indonesia dengan anggota Kongres Senior Amerika Serikat pada tahun 2019 untuk membahas mengenai peningkatan kerja sama pertahanan dan angkatan bersenjata kedua belah negara (Kemhan RI, 2019).

### C. Kemitraan Strategis Indonesia – Jepang

Kerja sama kemitraan strategis Indonesia dan Jepang dimulai sejak tahun 2006 dengan penandatanganan *Strategic Partnership for Peaceful and Prosperous Future* yang membahas mengenai kerja sama ekonomi, politik, keamanan dan pertahanan, perdagangan dan investasi, infrastruktur, penanggulangan bencana alam, bidang energi, dan riset serta teknologi. Penguatan kerja sama keamanan dan pertahanan dilakukan dengan landasan kerja sama kemitraan strategis, yaitu *Memorandum on Cooperation and Exchanges in the Field of Defense* pada tahun 2015. Ruang lingkup kerja sama antara lain dialog dan konsultasi antara institusi pertahanan; kerja sama dalam bidang pendidikan dan pelatihan;



pertukaran informasi tentang institusi dan isu pertahanan; serta kerja sama di bidang peralatan dan teknologi militer. (Treaty Kemlu RI, 2015).

Perkembangan terbaru dari kerja sama kemitraan strategis Indonesia dan Jepang adalah kunjungan Menteri Pertahanan Republik Indonesia, H. Prabowo Subianto ke Jepang pada tahun 2019 untuk membahas kerja sama pertahanan (Kemhan RI, 2019); dan telekonferensi kembali dilakukan pada tahun 2020 dalam upaya peningkatan kerja sama pertahanan kedua belah negara melalui pelaksanaan kembali pengiriman perwira Indonesia ke Jepang, pembentukan program latihan bersama, dan pertukaran teknologi militer (Kemhan Jepang, 2020).

#### D. Kemitraan Strategis Indonesia – Jerman

Hubungan Indonesia – Jerman dimulai sejak dibentuknya kemitraan strategis yang berjudul *Comprehensive Partnership: Shaping Globalisation and Sharing Responsibility* pada tahun 2012. Pilar kemitraan ini meliputi kerja sama politik, pertahanan, keamanan, dan ekonomi. Pilar pertahanan meliputi peningkatan interaksi bilateral dengan pembentukan *Indonesia-Germany Advisory Group (IGAG)*, *Indonesia-Germany Defence Dialogue (IGDD)* dan *Bilateral Defense Cooperation* (Bappenas, 2015, p. 59). Pilar pertahanan dibahas di dalam *Memorandum of Understanding (MoU) in the Field of Defence* di antara kedua belah negara yang ditandatangani pada 27 Februari 2012. Bentuk kerja sama meliputi kunjungan resmi, pelatihan, latihan bersama, pertukaran informasi dan pengalaman (Treaty Kemlu RI, 2012).

Perkembangan terbaru dari kemitraan strategis antara Indonesia – Jerman adalah pembelian 180 *Main Battle Tank (MBT) Leopard* dan *Marder*; pembelian 18 pesawat latihan *Grob G120TP-A*; pengembangan pabrik amunisi kaliber besar untuk amunisi *Leopard* melalui *Transfer of Technology (ToT) Rheinmetall* dan PT. Pindad; latihan perang bersama;



dan pembentukan kerja sama *Civil Military Coordination* (CIMIC) yang dilakukan dari tahun 2012-2017 (Karomah, 2017, pp. 5-12).

#### E. Kemitraan Strategis Indonesia – Korea Selatan

Indonesia dan Korea Selatan secara resmi menandatangani perjanjian kemitraan strategis yang berjudul *Strategic Partnership to Promote Friendship and Cooperation in the 21<sup>st</sup> Century* pada tahun 2006. Perjanjian tersebut membahas mengenai beberapa pilar, antara lain pilar kerja sama politik dan keamanan, ekonomi, sains dan teknologi. Kerja sama pertahanan di antara kedua belah negara dibentuk pada tahun 2013 yang mencakup dialog dan konsultasi bilateral rutin; pertukaran pengalaman; pertukaran personil untuk pendidikan, latihan, dan penelitian bersama; pertukaran data ilmiah dan teknologi; dan bantuan serta dukungan logistik pertahanan (Treaty Kemlu RI, 2013).

Perkembangan terbaru dari pelaksanaan kerja sama pertahanan Indonesia dan Korea Selatan adalah pelaksanaan *Transfer of Technology* (ToT) Kapal Selam Tipe 209/1400 (Changbogo). Kerja sama ini dilaksanakan antara *Daewoo Shipbuilding & Marine Engineering* (DSME) Korea Selatan bersama dengan PT. Penataran Angkatan Laut (PAL) Indonesia (Persero). ToT dilaksanakan secara bertahap, 2 (dua) kapal selam pertama dibangun secara penuh di DSME dengan melibatkan 186 personel PT. PAL, diikuti dengan kapal ketiga yang telah dibangun di DSME secara modul per modul dan dirakit di PT. PAL Indonesia (Persero), kapal selam ketiga dinamai KRI Alugoro-405 (Naval News, 2019).

#### F. Kemitraan Strategis Indonesia – Rusia



Indonesia dan Rusia memulai kemitraan strategis dengan pembentukan *Declaration of the Framework of Friendly and Partnership Relations in the 21<sup>st</sup> Century* pada tahun 2003. Perdamaian regional dan internasional menjadi fokus dari deklarasi tersebut, selain dialog bilateral, pertemuan, dan pertukaran delegasi dalam kegiatan *capacity building* (Treaty Kemlu RI, 2003). Meskipun perjanjian yang secara khusus membahas mengenai pertahanan belum terbentuk, kedua belah negara telah menandatangani perjanjian yang berkaitan dengan kerja sama teknik-militer dan hak atas kekayaan intelektual terhadap kerja sama tersebut pada saat yang sama dengan deklarasi kerangka hubungan persahabatan. Kerja sama teknik-militer mencakup penyediaan peralatan militer; pemeliharaan, perbaikan, dan peningkatan kualitas alutsista; pertukaran spesialis sebagai bentuk *capacity building*; dan pelatihan personel (Treaty Kemlu RI, 2003).

Perkembangan terbaru dari kerja sama pertahanan Indonesia dan Rusia adalah pertemuan Menteri Pertahanan Republik Indonesia dengan Menteri Pertahanan Federasi Rusia pada 28 Januari 2020 untuk membahas mengenai pembelian kembali 11 unit Pesawat Su-35 (Kemhan RI, 2020). Sebelumnya Indonesia pernah membeli 2 unit Pesawat Su-27 dan Su-30 pada tahun 2003, dilanjutkan dengan pembelian seri yang sama pada 2008 sebanyak 3 unit, dan pembelian Pesawat Su-30 kembali dilakukan pada tahun 2012 (Lidwina, 2020).

### G. Kemitraan Strategis Indonesia – Tiongkok

Hubungan diplomatik di dalam kerangka kemitraan strategis antara Indonesia dan Tiongkok dimulai dengan pembentukan *Joint Declaration on Strategic Partnership* pada April 2005. Perjanjian kemitraan strategis ini menjadi landasan bagi kerja sama lanjutan dalam bidang politik dan keamanan, ekonomi dan pembangunan, serta sosial dan



budaya. Kerja sama dalam bidang pertahanan meliputi dialog bilateral, industri pertahanan, pertahanan maritim, dan *capacity building* (Treaty Kemlu RI, 2005).

Kerja sama pertahanan Indonesia dan Tiongkok dilaksanakan melalui program *sharp knife* sebagai latihan bersama anti-terorisme yang melibatkan angkatan bersenjata; pembelian rudal dan *transfer of technology* yang melibatkan PT. Dirgantara Indonesia (DI), untuk penguatan alutsista khususnya rudal anti-kapal (C-705) (Agustino, 2016); pertukaran perwira untuk mempelajari sistem pertahanan (OkeNews, 2015); dan pertemuan bilateral antara Menteri Pertahanan Indonesia dan Tiongkok pada tahun 2020 untuk membahas mengenai kerja sama pertahanan kedua belah negara (Xinhua, 2020).

#### **4.3 Amerika Serikat, Tiongkok, dan Netralitas Indonesia di Kawasan Asia Tenggara**

Asia Tenggara merupakan kawasan di antara Samudra Hindia dan Samudra Pasifik, yang memiliki nilai strategis sebagai jalur perdagangan dan pelayaran dunia, serta sumber daya alam yang dapat dimanfaatkan untuk mewujudkan kesejahteraan negara. Nilai strategis tersebut membuat wilayah Asia Tenggara menarik perhatian negara-negara *super power* di dalam sistem internasional (Liwe, 2019, pp. 88-89). Konstelasi geografis Asia Tenggara bukan hanya memberikan keuntungan, tetapi juga ancaman terhadap negara di sekitar kawasan tersebut. Salah satu ancaman yang timbul karena nilai strategis jalur perdagangan, pelayaran dan sumber daya, adalah klaim sepihak oleh Tiongkok di Laut Tiongkok Selatan.

Klaim Tiongkok menggunakan *nine-dash line* tersebut diperparah dengan sikap asertifnya melalui reklamasi untuk pembuatan pulau dan pembangunan pangkalan militer, pelarangan menangkap ikan di wilayah tersebut, menangkap nelayan-nelayan



asing serta peningkatan intensitas patroli laut di Laut Tiongkok Selatan (Department of Defense of the United States of America, 2019, p. 75). Amerika Serikat menjamin kehadiran negaranya dan sekaligus mencegah perluasan hegemoni Tiongkok di kawasan Laut Tiongkok Selatan dengan strategi *rebalancing Pivot to Asia* (Broderick, 2015, p. 9). Negara-negara di Asia Tenggara melaksanakan kebijakan dan strategi tertentu untuk mempertahankan eksistensinya dari Amerika Serikat dan Tiongkok sebagai negara *super power* (Lowy Institute, 2019, pp. 4-5) yang mengancam stabilitas kawasan tersebut.

Negara-negara di Asia Tenggara memiliki status sebagai negara *middle power* seperti Singapura, Malaysia, Thailand, Indonesia, Vietnam, dan Filipina; serta negara *minor power* seperti Brunei Darussalam, Myanmar, Kamboja, dan Laos (Lemahieu, 2019). Status tersebut mempengaruhi identitas politik setiap negara, begitu juga dengan Indonesia. Identitas politik yang berbeda akan menghasilkan kebijakan dan strategi yang berbeda dalam upaya untuk mewujudkan kepentingan tertentu dari sebuah negara. Dalam upaya untuk merespon perang hegemoni antara Amerika Serikat dan Tiongkok di Laut Tiongkok Selatan, negara-negara di Asia Tenggara melakukan strategi *external balancing* yang menghasilkan aliansi dan kemitraan strategis dengan kedua negara tersebut (lihat tabel 1). Strategi *balancing* bertujuan untuk meningkatkan kapabilitas pertahanan negara dan mengamankan eksistensinya di dalam sistem internasional.

**Tabel 1**

**Strategi *Balancing* Negara-Negara di Asia Tenggara**

| Status              | Negara   | Mitra <i>Balancing</i> | Strategi <i>External Balancing</i>   |
|---------------------|----------|------------------------|--|
| <i>Middle Power</i> | Filipina | Amerika Serikat        | Aliansi: sejak tahun 2003 menjadi mitra aliansi Amerika Serikat dengan status <i>major non-NATO ally</i> |





|                    |                   |                             |   |
|--------------------|-------------------|-----------------------------|---|
|                    | Indonesia         | Amerika Serikat<br>Tiongkok | Kemitraan strategis: <i>Joint Declaration on the Comprehensive Partnership</i> pada November 2010 (Amerika Serikat); dan <i>Joint Declaration on Strategic Partnership</i> pada April 2005 (Tiongkok) |
|                    | Malaysia          | Amerika Serikat             | Kemitraan strategis: melalui <i>Comprehensive Partnership</i> yang diratifikasi pada tahun 2014   |
|                    | Singapura         | Amerika Serikat             | Kemitraan strategis: <i>Strategic Framework Agreement</i> pada tahun 2005   |
|                    | Thailand          | Amerika Serikat<br>Tiongkok | Aliansi: menjadi sekutu Amerika Serikat sejak tahun 2003; dan<br>Kemitraan strategis: <i>Comprehensive Strategic Cooperative Partnership</i> pada tahun 2012  |
|                    | Vietnam           | Amerika Serikat             | Kemitraan strategis: <i>Comprehensive Partnership</i> pada tahun 2013; dan memulai pembicaraan untuk membentuk kemitraan strategis sejak 2014   |
| <b>Minor Power</b> | Brunei Darussalam | Tiongkok                    | Kemitraan strategis: pembicaraan mengenai <i>Strategic Cooperative Partnership</i> sejak 2018   |
|                    | Kamboja           | Tiongkok                    | Kemitraan strategis: <i>China-Cambodia Comprehensive Strategic Partnership of Cooperation</i> sejak Mei 2010  |
|                    | Laos              | Tiongkok                    | Kemitraan strategis: <i>China-Laos Comprehensive Strategic Cooperative Partnership</i> sejak Mei 2009   |
|                    | Myanmar           | Tiongkok                    | Kemitraan strategis: <i>China-Myanmar Comprehensive Strategic Cooperative Partnership</i> sejak Mei 2011  |

Sumber: olahan penulis dari Yani, Y. M., Montratama, I. (2017). *Quo Vadis Politik Luar Negeri Indonesia*. Jakarta: PT. Elex Media Komputindo, p. 77-79; Tran, T.B. (2020, July 15). *The Diplomat*. Retrieved from <https://thediplomat.com/2020/07/will-we-see-a-us-vietnam-strategic-partnership/>; dan Xinhua. (2018, November 19). *Xinhua*. Retrieved from [http://www.xinhuanet.com/english/201811/19/c\\_13717688.htm](http://www.xinhuanet.com/english/201811/19/c_13717688.htm)

Asia Tenggara sebagai kawasan dengan negara-negara berstatus *middle power* dan *minor power*, cenderung mendukung stabilitas dan keterpaduan setiap negara di dunia. Kebijakan luar negeri dari negara-negara dengan status tersebut, dihasilkan melalui pertimbangan khusus terhadap identitas politik luar negeri. Indonesia dan Thailand

**Bagan 1**  
**Amerika Serikat, Tiongkok, dan Netralitas**  
**Indonesia di Kawasan Asia Tenggara**



Sumber: olahan penulis

adalah contoh negara yang melaksanakan kerja sama dengan Amerika Serikat dan Tiongkok, tetapi Thailand telah terlibat di dalam sebuah aliansi dengan Amerika Serikat. Hal ini membuat Indonesia menjadi satu-satunya negara yang netral dalam hubungan antara kawasan Asia Tenggara dengan negara *super power* (lihat bagan 1). Politik bebas aktif Indonesia telah

membentuk identitas yang berbeda dari negara-negara lain di Asia Tenggara, dan membuat Indonesia dapat terlibat dalam kerja sama pertahanan dengan Amerika Serikat dan Tiongkok. Kerja sama ini bertujuan untuk mewujudkan kepentingan nasional, seperti keamanan negara, integritas teritorial, dan keamanan manusia; serta mencegah ketidaksetaraan kekuatan antar negara di dunia.

## 5. Kesimpulan

Negara membentuk kebijakan dan strategi tertentu berdasarkan identitas politik negaranya dan pemahaman terhadap sistem internasional. Elemen pembentuk identitas seperti interaksi, norma, kebudayaan, status dan sejarah akan diinterpretasikan secara berbeda melalui pemahaman yang berbeda dari setiap negara. Instabilitas yang terjadi di kawasan Asia Tenggara dengan perang hegemoni antara Amerika Serikat dan Tiongkok



di Laut Tiongkok Selatan, mengharuskan setiap negara di kawasan tersebut membentuk strategi responsif untuk menciptakan stabilitas kekuatan dengan kedua *super power* tersebut.

Melalui pemahaman yang berbeda, negara-negara di Asia Tenggara memiliki kecenderungan untuk melaksanakan kerja sama dengan Amerika Serikat atau Tiongkok. Di sisi lain Indonesia melalui pemahamannya, membentuk dan melaksanakan identitas politik luar negeri yang bebas aktif. Identitas bebas aktif membuat Indonesia terbebas dari kecenderungan dalam melaksanakan diplomasi pertahanan untuk membentuk kerja sama dan dapat dengan bebas membentuk kebijakan serta strategi yang digunakan untuk mewujudkan kepentingan nasional dan mempertahankan eksistensinya di dalam sistem internasional.

### Daftar Pustaka

- Abke, Tom. 2019. *Indo-Pacific Defense Forum*. 26 November. <https://ipdefenseforum.com/id/2019/11/pertukaran-di-antara-australia-dan-indonesia-memperkuat-kemitraan-pertahanan/>.
- Agustino, Leo. 2016. "Hubungan Baru Indonesia-China dan Membangun Poros Maritim Dunia." *Analisis CSIS Vol. 45 No. 2* 176-193.
- Bappenas. 2015. *Sinergi Kerja Sama Pembangunan dan Kerja Sama Kemitraan Strategis Bilateral*. Jakarta: Badan Perancangan Pembangunan Nasional.
- Broderick, Kelsey. 2015. *Chinese Activities in the South China Sea: Implications for the American Pivot to Asia*. Virginia: Project 2049 Institute.
- Busse, Nikolas. 1999. "Constructivism and Southeast Asian Security." *The Pacific Review* 39-60.



Cha, Victor D. 2000. "Globalization and the Study of International Security." *Journal of Peace Research* 391-403.

Department of Defense of the United States of America. 2019. *Military and Security's Developments Involving the People's Republic of China*. The United States of America: Office of the Secretary of Defense.

Djumati, Ninggimus Yolemal, Johny P. Lengkong, and Trilke E. Tulung. 2002. "Kebijakan Politik Luar Negeri Indonesia pada Pemerintahan Jokowi dalam Upaya Penyelesaian Konflik di Myanmar." *Jurnal Politico* 1-23.

Drab, Lech. 2018. "Defence Diplomacy - An Important Tool for the Implementation of Foreign Policy and Security of The State." *Security and Defence* 57-71.

DSCA. 2020. *Defense Security Cooperation Agency*. 6 July. <https://www.dsca.mil/major-arms-sales/indonesia-mv-22-block-c-osprey-aircraft>.

Haryanto, Agus. 2014. "Prinsip Bebas Aktif dalam Kebijakan Luar Negeri Indonesia: Perspektif Teori Peran." *Jurnal Ilmu Politik dan Komunikasi* 17-27.

Hatta, Mohammad. 2015. *Mendayung di Antara Dua Karang*. Bandung: Segi Arsy.

Indrawati, and Agung Yudhistira Nugroho. 2018. "Diplomasi Maritim Indonesia dalam Kerangka Politik Luar Negeri Bebas Aktif." *Konvensi Nasional Asosiasi Ilmu Hubungan Internasional Indonesia*. Tanjungpinang: Universitas Maritim Raja Ali Haji. 71-103.

Jackson, Robert, and Georg Sorensen. 2013. *Pengantar Studi Hubungan Internasional*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Jones, Matthew R, and Helena Karsten. 2008. "Gidden's Structuration Theory and Information Systems Research." *MIS Quaterly* 127-157.



- Jordaan, Eduard. 2003. "The Concept of a Middle Power in International Relations: Distinguishing between Emerging and Traditional Middle Powers." *South African Journal of Political Studies* 165-181.
- Karomah, Titik. 2017. "Kerja Sama Pertahanan Indonesia - Jerman Melalui Deklarasi Jakarta Tahun 2012 - 2016." *Jurnal Online Mahasiswa FISIP* 1-15.
- Kaufman, Stuart J, Richard Little, and William C. Wohlforth. 2007. *The Balance of Power in World History*. New York: Palgrave Macmillan.
- Kemhan Jepang. 2020. *Japan Ministry of Defense*. 12 August. [https://www.mod.go.jp/e/d\\_act/exc/area/docs/2020/20200812\\_j-ind-en.html](https://www.mod.go.jp/e/d_act/exc/area/docs/2020/20200812_j-ind-en.html).
- Kemhan RI. 2019. *Kementerian Pertahanan Republik Indonesia*. 13 July. <https://www.kemhan.go.id/2019/07/31/menhan-ri-dan-delegasi-kongres-as-bahas-peningkatan-kerjasama-pertahanan.html>.
- . 2019. *Kementerian Pertahanan Republik Indonesia*. 20 December. <https://www.kemhan.go.id/2019/12/22/menhan-ri-lakukan-kunjungan-kehormatan-kepada-menhan-jepang.html>.
- . 2020. *Kementerian Pertahanan Republik Indonesia*. 28 January. <https://www.kemhan.go.id/2020/01/28/menhan-ri-rusia-bahas-kerjasama-pertahanan-dalam-kemitraan-strategis.html>.
- Kemlu RI. 2014. *Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia*. 4 December. <https://kemlu.go.id/canberra/en/read/australia/2187/etc-menu>.
- Keohane, Robert O. 1986. *Theory of World Politics: Structural Realism and Beyond*. New York: Columbia University Press.
- Koran Tempo. 2008. *Koran Tempo*. 8 February. <https://koran.tempo.co/read/internasional/122490/traktat-lombok-resmi-berlaku?>



- Lemahieu, Herve. 2019. *BRINKNews*. 13 October. <https://www.brinknews.com/how-the-middle-powers-are-determining-asias-power-balance/>.
- Lidwina, Andrea. 2020. *Kata Data*. 30 January. <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2020/01/30/berapa-pesawat-sukhoi-yang-pernah-dibeli-indonesia>.
- Liwe, Amelia Joan. 2019. "Makna Strategis Kajian Wilayah Asia Tenggara dari Sudut Pandang Hubungan Internasional ." *Jurnal Ilmiah Hubungan Internasional* 87-95.
- Lowy Institute. 2019. *Asia Power Index*. Sydney: Lowy Institute.
- Lyng, Ted. 2012. *United States - Indonesia Comprehensive Partnership: Progress and Challenges*. Jakarta: USIndo Brief.
- Montratama, Ian. 2016. "Rekonstruksi Politik Luar Negeri Indonesia di Tengah Dinamika Lingkungan Strategis Indo Pasifik Abad Ke-21." *Intermestic: Journal of International Studies* 36-61.
- Montratama, Ian. 2015. "Strategic Re-Allignment: Alternatif Indonesia dalam Mengimbangi Ancaman Aliansi Five Powers Defense Arrangement (FPDA)." *Jurnal Pertahanan* 129-153.
- Montratama, Ian, and Yanyan Mochamad Yani. 2017. "Bargaining: Revisi Teori Perimbangan Kekuatan dalam Hubungan Diplomasi Indonesia, Malaysia, Cina, dan Amerika Serikat." *Intermestic: Journal of International Studies* 53-73.
- Naval News. 2019. *Naval News*. 12 April. <https://www.navalnews.com/naval-news/2019/04/indonesias-pt-pal-launched-its-first-locally-built-submarine-for-tni-al/>.
- Nia, Mahdi Mohammad. 2010. "Understanding Iran's Foreign Policy: An Application of Holistic Constructivism." *Alternatives: Turkish Journal of International Relations* 148-180.



OkeNews. 2015. OkeNews. 02 June.

<https://news.okezone.com/read/2015/06/02/65/1158915/50-siswa-sesko-tni-pelajari-pertahanan-militer-tiongkok>.

Perutusan Tetap Republik Indonesia untuk ASEAN di Jakarta. 2015.  
<https://kemlu.go.id/ptri-asean/id/pages/komunitas-asean/965/etc-menu>.

Sabiring, Umar, Syaiful M., and Suparman Arif . 2014. "Kebijakan Politik Perdana Menteri Sutan Sjahrir untuk Mempertahankan Kemerdekaan RI." *PESAGI: Jurnal Pendidikan dan Penelitian Sejarah Unila (PESAGI:)* 1-12.

Tempo.co. 2014. *Nasional Tempo*. 21 April. <https://nasional.tempo.co/read/572071/untung-rugi-tni-ad-beli-helikopter-amerika-serikat>.

Treaty Kemlu RI. 2006. *Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia*. 13 November.  
<https://treaty.kemlu.go.id/apisearch/pdf?filename=AUS-2006-0164.pdf>.

—. 2015. *Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia*. 26 October.  
<https://treaty.kemlu.go.id/apisearch/pdf?filename=USA-2015-0346.pdf>.

—. 2015. *Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia*. 23 March.  
<https://treaty.kemlu.go.id/apisearch/pdf?filename=JPN-2015-0513.pdf>.

—. 2012. *Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia*. 27 February.  
<https://treaty.kemlu.go.id/apisearch/pdf?filename=DEU-2012-0145.pdf>.

—. 2013. *Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia*. 12 October.  
<https://treaty.kemlu.go.id/apisearch/pdf?filename=KOR-2013-0111.pdf>.

—. 2003. *Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia*. 21 April.  
<https://treaty.kemlu.go.id/apisearch/pdf?filename=RUS-2003-0013.pdf>.

—. 2003. *Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia*. 21 April.  
<https://treaty.kemlu.go.id/apisearch/pdf?filename=RUS-2003-0012.pdf>.



- . 2005. *Kementarian Luar Negeri Republik Indonesia*. 25 April.  
<https://treaty.kemlu.go.id/apisearch/pdf?filename=CHN-2005-0065.pdf>.
- U.S. Embassy Jakarta. 2019. *Kedutaan Besar AS di Indonesia*. 13 Agustus.  
<https://id.usembassy.gov/id/korps-marinir-as-dan-indonesia-ikuti-latihan-militer-bersama/>.
- Wendt, Alexander. 1992. "Anarchy is what States Make of It." *International Organization* 391-425.
- Wilkins, Thomas S. 2011. "'Alignment', not 'Alliance' - The Shifting Paradigm of International Security Cooperation: Toward a Cooperation Taxonomy of Alignment." *Review of International Studies* 53-76.
- Xinhua. 2020. *Xinhua*. 08 September. [http://www.xinhuanet.com/english/2020-09/08/c\\_139353356.htm](http://www.xinhuanet.com/english/2020-09/08/c_139353356.htm).
- Yani, Yanyan Mochamad, and Ian Montratama. 2017. *Quo Vadis Politik Luar Negeri Indonesia*. Jakarta: PT. Elex Media Komputindo.